

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PETANI TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI BALI

Suharyanto¹, Jemmy Rinaldi², Nyoman Ngurah Arya² dan Ketut Mahaputra²

¹ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Mentok Km 4, Pangkalpinang 33134
email : suharyanto.bali@gmail.com

² Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar 80222

ABSTRACT

Factors Influenced Farmer Perception on Sustainable Food Crop Land Protection Policy in Bali Province. Irrigated land conversion in Bali Province continues to increase along with the development of regional economy. The issuance of Law No.4/2009 on Sustainable Food Crop Agricultural Land Protection (SFCALP), are expected to restrain the rate of rice irrigated land conversion. The study aims to determine the factors that affect the perception of farmers on policy implementation of SFCALP. The data collection was conducted in July-September 2015 by interviews using questionnaires distributed to 90 farmers each of 30 farmers in Tabanan, Buleleng and Badung regency. To analyze the factors that influence the perception of farmers to policy implementation of SFCALP estimated by multiple linear regression with Ordinary Least Squares (OLS) method. The analysis showed that the farmer's perception to the policy implementation of SFCALP is influenced by: farming culture, attitude toward change, confidence self-efficacy, the level of courage risk, level of intelligence, rationality, cooperation, the role of the farmer groups as well as the intensity of counseling or related SFCALP. To improve the effectiveness of policy implementation of SFCALP it is necessary to consider differences in the level of perception of the policy with optimizes the role members of the farmer groups and farmer innovator accompanied by intensive socialization, participation and government commitment in implementation.

Keywords: *SFCALP, perception, farmer, factors*

ABSTRAK

Alih fungsi lahan sawah beririgasi di Provinsi Bali terus meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian wilayah. Terbitnya Undang-Undang No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli - September 2015 melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner terhadap 90 petani yang terdistribusi masing-masing 30 petani di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Badung. Untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B dilakukan melalui regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B dipengaruhi oleh : budaya bertani, sikap terhadap perubahan, keyakinan kemampuan diri, tingkat keberanian berisiko, tingkat intelegensia, rasionalitas, kerjasama, peran dalam kelompok tani serta intensitas penyuluhan ataupun sosialisasi terkait PLP2B. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PLP2B perlu mempertimbangkan perbedaan tingkat persepsi terhadap kebijakan tersebut dengan mengoptimalkan peran anggota dalam kelompok tani maupun petani innovator disertai dengan sosialisasi intensif, partisipatif dan komitmen pemerintah dalam implementasinya.

Kata kunci: *PLP2B, persepsi, petani, factor-faktor*

PENDAHULUAN

Ketersediaan lahan pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, maka diperlukan langkah konkrit yang dapat mencegah keberlanjutan konversi lahan sekaligus menjamin ketersediaan pangan. Irawan (2005) menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh konversi lahan pertanian terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif dan progresif. Menurut Sumaryanto *et al.* (1996) dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. *Pertama*, dari fungsinya, lahan sawah ditujukan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. *Kedua*, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi terhadap besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetakan sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Dampak lain dari alih fungsi lahan pertanian adalah kesempatan kerja pertanian menurun sejalan dengan menurunnya lahan pertanian yang tersedia, kesempatan kerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi padi, dan degradasi lingkungan. Laju pertumbuhan konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (Irawan, 2005; Suharyanto *et al.*, 2016 dan Janti *et al.*, 2016) : (a) keterbatasan sumberdaya lahan dan infrastrukturnya, (b) pertumbuhan penduduk, (c) pertumbuhan ekonomi, (d) tingginya nilai *land rent*, (e) fragmentasi lahan dan tipe tanah, (f) relatif kecilnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Hasil penelitian Benu *et al.*, (2013) ketahanan pangan rumah tangga juga sebagai faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Selain itu peningkatan konversi lahan menurut Rachmat dan Muslim (2013) juga disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang berkecenderungan mengkonversi lahan sawah atas nama untuk kepentingan pembangunan daerahnya.

Alih fungsi lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Untuk melindungi lahan pertanian dari penggunaan non-pertanian, pemerintah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Pasal 3 UU 41/2009 menyatakan bahwa UU ini dibuat dengan tujuan: (a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mewujudkan revitalisasi pertanian. Dalam pelaksanaannya diatur melalui beberapa peraturan pemerintah, antara lain: PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B; PP No. 12 Tahun 2012 tentang insentif PLP2B; PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi PLP2B; dan PP No.30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan PLP2B. Lebih teknis lagi diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di Provinsi Bali, Undang undang beserta Peraturan

Pemerintah tersebut hingga tahun 2015 baru diimplementasikan dalam bentuk Perda Provinsi Bali N0 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian seluas 298.214 ha (52,91%) dan khusus untuk tanaman pangan seluas 76.337 ha (134%).

Adanya berbagai peraturan tersebut belum menjamin petani pemilik lahan untuk mempertahankan lahan, karena belum tentu terdapat kesesuaian antara insentif yang diberikan oleh pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan petani. Menurut Rokhmah (2012) dan Janti *et al.*, (2016) berbagai kendala dalam perencanaan dan implementasi PLP2B antara lain: (1). kebijakan penataan ruang wilayah yang belum cukup melindungi eksisting lahan pertanian pangan, (2) pelanggaran regulasi penataan ruang wilayah, (3) keterbatasan alokasi anggaran perencanaan kebijakan, (4). pemegang kekuasaan dan pemilik capital sebagai kelompok yang berkepentingan, (5) sulit memperoleh kesediaan petani, (6) terbatasnya ketersediaan lahan pertanian dan (7) belum adanya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian yang dimiliki. Arrozi dan Saptana (2013) juga menyatakan bahwa implementasi dari peraturan tersebut masih belum efektif dan masih jauh dari harapan. Persepsi petani terhadap PLP2B merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan karena petani merupakan pihak utama yang akan menentukan terlaksananya upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Zakaria dan Rachman (2013) menyatakan bahwa implementasi PLP2B sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi petani. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B. Informasi ini diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan PLP2B sehingga dapat mendukung keberhasilan program ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – November 2015 pada tiga kabupaten sebagai sentra produksi padi sawah di Provinsi Bali, namun konversi lahan sawahnya paling luas. Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung. Pada tahun 2013 luas lahan sawah di Bali berkurang 460 ha (0,56%). Kabupaten yang mengalami penurunan luas lahan sawah tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Tabanan 204 ha, Kabupaten Buleleng 135 ha dan Kabupaten Badung seluas 51 ha. Secara kumulatif Selama periode 1999-2013 telah terjadi konversi lahan sawah seluas 4906 hektar ke berbagai bentuk lahan seperti menjadi lahan pertanian bukan sawah atau lahan bukan pertanian. Jika dirata-ratakan penurunan lahan sawah per tahun sekitar 350 ha (-0,41%) (BPS Provinsi Bali, 2013).

Penelitian menggunakan data primer yang didukung data sekunder. Data sekunder bersumber dari BPS, BPN dan Bappeda Provinsi Bali, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani padi sawah dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah karakteristik petani dan usahatani padi sawah dan persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B. Data petani yang dikumpulkan sebanyak 90 petani yang terdistribusi: a) 30 petani di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, b) 30 petani dari Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dan c) 30 petani dari Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Mengingat masih minimnya sosialisasi terhadap program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka sebelum pengambilan data terkait persepsi petani terhadap PLP2B terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok tani calon responden di ketiga lokasi penelitian tersebut baik menyangkut aspek teknis, finansial, penghargaan maupun sanksi dari regulasi tersebut. Informasi yang diterima petani akan diinterpretasikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B dilakukan dengan analisis regresi linier dengan metode *ordinary least square*. Peubah respon (dependen variabel) adalah persepsi petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B dengan 14 peubah bebas (independen variabel) dengan data bersifat interval dan rasio. Spesifikasi model persamaan regresinya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_{11} + \beta_{12} X_{12} + \beta_{13} X_{13} + \beta_{14} X_{14} + e$$

Dalam bentuk linier persamaan regresi tersebut dapat dituliskan :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 \ln X_5 + \beta_6 \ln X_6 + \beta_7 \ln X_7 + \beta_8 \ln X_8 + \beta_9 \ln X_9 + \beta_{10} \ln X_{10} + \beta_{11} \ln X_{11} + \beta_{12} \ln X_{12} + \beta_{13} \ln X_{13} + \beta_{14} \ln X_{14} + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat persepsi petani terhadap kebijakan PP2B yang meliputi indikator kesesuaian, kerumitan, keuntungan relatif, dapat diterapkan dan diamati/diawasi (total skor) terhadap karakteristik kebijakan PLP2B.

β_0 = intersept

β_1 - β_{14} = koefisien regresi

X_1 = umur, adalah usia petani mulai sejak lahir sampai dengan saat penelitian dilakukan (tahun)

X_2 = pendidikan, adalah lama pendidikan formal yang ditempuh petani (tahun)

X_3 = budaya bertani, adalah kebiasaan yang dilakukan petani secara turun temurun serta norma/aturan kesepakatan bersama yang dijalankan (total skor)

X_4 = sikap terhadap perubahan, adalah kecenderungan petani bertindak untuk memperbaiki dirinya (total skor)

X_5 = keyakinan kemampuan diri, adalah keyakinan diri petani akan

kemampuan/kompetensinya untuk mengerjakan sesuatu secara memadai, mencapai tujuan atau mengatasi rintangan (total skor)

X_6 = tingkat keberanian berisiko, adalah tingkat keberanian dalam mencoba hal yang baru (total skor)

X_7 = tingkat intelegensia, adalah kemampuan petani mempertimbangkan pilihan yang ada dalam mengelola usahatani padi sawah (total skor)

X_8 = tingkat rasionalitas, adalah pendapat positif atau negatif atau kemungkinan terhadap program baru (total skor)

X_9 = Harapan suatu hasil, adalah pendapat petani terhadap hasil yang ingin didapatkan dari penerapan hal yang baru (total skor)

X_{10} = kerjasama, adanya intensitas kerjasama yang dilakukan petani dengan pihak lain (total skor)

X_{11} = interaksi, adalah intensitas hubungan sosial yang dilakukan oleh petani (total skor)

X_{12} = kekosmopolitan, adalah intensitas penggunaan media informasi oleh petani (total skor)

X_{13} = peran dalam kelompok tani, adalah penilaian petani terhadap peran anggota maupun pengurus kelompok (total skor)

X_{14} = intensitas sosialisasi/penyuluhan, adalah kunjungan petugas dalam melakukan sosialisasi PLP2B (kali per tahun)

Untuk memperoleh validitas hasil pengujian ekonometrik metode OLS, dilakukan pendeteksian penyimpangan dari asumsi-asumsi klasik dan terhadap kesesuaian model (Pindyck and Rubinfeld, 1998). Pengujian terhadap asumsi klasik ditujukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi estimasi merupakan penaksir tak bias yang terbaik (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani dan Usahatani Padi Sawah

Struktur umur petani responden di ketiga lokasi penelitian relatif tidak jauh berbeda dimana kisaran umur 38-70 tahun dengan rata-rata umur responden 56 tahun. Rata-rata umur petani responden seperti terlihat pada Tabel 1, mengisyaratkan bahwa sektor pertanian khususnya usahatani padi sawah cenderung kurang banyak diminati oleh penduduk pedesaan usia produktif (25-40 tahun). Pertumbuhan sektor non pertanian yang dinamis khususnya jasa dan pariwisata membuka peluang lapangan pekerjaan yang cukup besar, sehingga penduduk usia muda di pedesaan lebih cenderung untuk memilih bekerja diluar sektor pertanian. Meskipun ada keterkaitan antara rata-rata usia kerja kepala rumah tangga dengan pengalaman usahatani, semakin tua usia seseorang juga menunjukkan kemampuan untuk menerapkan hal yang baru juga terbatas. Sebagaimana dinyatakan oleh Sutarto (2008) bahwa petani yang berusia lanjut akan sulit untuk diberikan pengertian pengertian yang dapat mengubah cara berfikir, cara kerja dan cara hidup sehingga akan mempengaruhi responnya terhadap sesuatu yang baru.

Pada Tabel 1. terlihat bahwa rata-rata pendidikan responden di ketiga lokasi penelitian adalah 7,7 tahun atau setara tamat SD. Rata-rata

tingkat pendidikan tertinggi dijumpai di Kabupaten Buleleng yaitu setara tamat SMP, sedangkan Kabupaten Tabanan dan Badung hanya setara tamat SD. Dengan tingkat pendidikan yang rata-rata tidak tamat SMP atau setara tamat SD, dapat dipahami bahwa pekerjaan di sektor pertanian saat ini bukanlah pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian/ketrampilan khusus. Fenomena ini menjadikan sektor pertanian sulit berkembang, kemampuan untuk dapat menerapkan sesuatu yang baru membutuhkan tingkat kemampuan yang memadai untuk menerima, mengolah dan menerapkannya.

Secara umum jumlah anggota rumah tangga petani responden tidak berbeda untuk ketiga lokasi penelitian dimana rata-rata anggota rumah tangga sebanyak lima orang. Besarnya anggota rumah tangga secara langsung tidak mencerminkan keterlibatannya bekerja di sektor pertanian. Kuatnya faktor pendorong di luar sektor pertanian menyebabkan pemanfaatan anggota rumah tangga didalam kegiatan usahatani sangat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut hampir sebagian besar tenaga kerja yang bekerja pada usahatani padi sawah merupakan tenaga kerja luar keluarga. Hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan jumlah tenaga kerja produktif yang terdapat pada masing masing petani responden dengan tenaga kerja produktif yang terlibat langsung pada usahatani padi sawah untuk masing-masing rumah tangga, dimana rata-rata tenaga kerja produktif yang terdapat pada

Tabel 1. Karakteristik petani padi sawah di Kabupaten Badung, Tabanan dan Buleleng, Tahun 2015.

Karakteristik Responden	Kabupaten			Rata-Rata
	Badung	Tabanan	Buleleng	
Umur (th)	57,33	57,4	53,83	56,19
Pendidikan (th)	5,71	7,84	9,72	7,76
Jumlah anggota rumah tangga (jiwa)	4,95	5,12	5,28	5,12
Pengalaman usahatani padi sawah (th)	31,25	33,88	23,94	29,69
Sumber pendapatan				
- Usahatani padi sawah	100,00	100,00	94,44	98,15
- Sampingan (selain usahatani padi)	79,16	40,00	55,56	58,24
Proporsi pendapatan usahatani padi thd pendapatan RT (%)	71,04	82,00	75,83	76,29
Jumlah tenaga kerja produktif/rumah tangga (org)	3,46	3,20	2,38	3,01
Jumlah tenaga kerja terlibat usahatani padi (org)	1,71	1,80	1,39	1,63

masing-masing rumah tangga rata-rata 3 orang dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada usahatani padi sawah hanya 1 orang.

Petani padi sawah di ketiga lokasi penelitian telah cukup lama melakukan kegiatan usahatani padi sawah dengan kisaran 23-33 tahun, yang dimulai sejak usia muda dan berlangsung hingga sekarang. Pengalaman selama mengelola kegiatan usahatani akan membentuk sikap petani terhadap inovasi usahatani yang diperkenalkan penyuluh pertanian terhadap sesuatu yang baru. Idraningsih (2011) menyatakan bahwa pengalaman merupakan salah faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap disamping faktor lainnya seperti orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi di dalam diri individu. Sikap yang diperoleh melalui pengalaman akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya. Pengalaman petani selama berinteraksi dengan penyuluh ataupun informasi yang diperoleh petani tentang PLP2B akan membentuk persepsi petani responden. Informasi yang diterima petani akan diinterpretasikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa 98,15% responden menyatakan bahwa usahatani padi sawah masih sebagai sumber pendapatan rumah tangga namun demikian usahatani padi bukan satu satunya sumber pendapatan mereka. Sekitar 58,24 responden yang memiliki pekerjaan sampingan di luar usahatani padi sawah seperti buruh, beternak, bengkel, wira usaha dan pekerjaan sampingan lainnya. Sebagaimana dinyatakan Pewista dan Harini (2013), diversifikasi jenis mata pencaharian terjadi sebagai upaya strategi dalam bertahan hidup, dimana seseorang akan meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan berpindah pekerjaan lain yang dianggap akan lebih menguntungkan. Selaras dengan hal tersebut proporsi pendapatan usahatani sawah terhadap pendapatan total rumah tangga yang sebesar 76,29%. Walaupun usahatani padi sawah menghadapi berbagai kendala pengembangannya namun kegiatan ini

masih menjadi sumber pendapatan utama rumah tangga di ketiga lokasi penelitian.

Penguasaan lahan dalam penelitian ini mencakup kepemilikan maupun penggarapannya. Dalam penelitian ini tidak dibedakan antara status milik yang dilengkapi bukti kepemilikan (sertifikat) ataupun yang belum dilengkapi sertifikat. Dalam transaksi penggarapan pada umumnya juga tidak disertai dengan perjanjian tertulis, tetapi hanya didasarkan atas kepercayaan dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Lahan sebagai faktor produksi mempunyai peranan besar terhadap peningkatan produksi dan pendapatan usahatani padi sawah. Pada Tabel 2 terlihat bahwa secara keseluruhan rata-rata penguasaan lahan garapan relatif kecil yaitu sebesar 0,47 hektar, dimana lahan milik sendiri seluas 0,26 hektar dan lahan yang berstatus sewa dan lainnya seluas 0,21 hektar. Dengan penguasaan lahan yang relatif kecil tentunya produksi dan pendapatan yang akan diperoleh juga akan rendah, terlebih apabila tidak diikuti dengan penerapan teknologi dan managerial yang baik. Lahan dengan status hak milik tersebut sebanyak 71,14% perolehannya melalui warisan keluarga secara turun temurun, 3,09% diperoleh secara membeli, 1,75% merupakan pemberian atau hibah dan sisanya sebesar 8,47% diperoleh dengan cara lainnya.

Hampir semua petani yang memiliki lahan sawah menggarap sendiri lahan sawah miliknya. Petani yang tidak memiliki lahan sawah memperoleh lahan garapan dengan menyewa ataupun bagi hasil (menyakap). Dalam kenyataannya yang menggarap persil-persil sawah dengan status sewa ataupun bagi hasil tidak hanya petani yang tidak memiliki sawah tetapi juga petani yang telah memiliki sawah. Hal ini antara lain disebabkan rata-rata luas kepemilikan lahan sawah pada umumnya relatif sempit sehingga petani-petani tersebut berusaha memperluas lahan garapannya agar dapat memperoleh pendapatan usahatani yang lebih banyak.

Luas lahan garapan yang dikuasai umumnya juga terfragmentasi menjadi beberapa persil, baik

Tabel 2. Karakteristik usahatani padi sawah di Kabupaten Badung, Tabanan dan Buleleng, tahun 2015.

Karakteristik Usahatani	Kabupaten			Rata- Rata
	Badung	Tabanan	Buleleng	
Luas lahan garapan (ha)	0,41	0,46	0,54	0,47
- Milik sendiri (ha)	0,23	0,32	0,23	0,26
- Sewa dll (ha)	0,17	0,14	0,31	0,21
Status perolehan (%)				
- Warisan	83,33	88,00	42,10	71,14
- Membeli	0,00	4,00	5,26	3,09
- Pemberian/hibah	0,00	0,00	5,26	1,75
- Lainnya	16,67	4,00	4,74	8,47
Jumlah persil (buah)	1,83	1,78	1,68	1,76
Lokasi lahan sawah dengan jalan utama (%)				
- Jauh	16,67	32,00	31,58	26,75
- Dekat	83,33	68,00	68,42	73,25
Pola tanam (%)				
- Padi-padi-palawija	0,50	76,00	57,89	61,30
- Padi-padi-bera	4,17	0,00	5,26	3,14
-Padi-padi-padi	37,5	24,00	21,05	27,52
- Lainnya	8,33	0,00	15,79	8,04
Kodisi irigasi (%)				
- Baik	66,67	68,00	74,21	69,63
- Rusak	33,33	32,00	25,79	30,37
Produktivitas gabah (t/ha)	5,84	6,25	6,18	6,09
Sistem penjualan (%)				
- Timbang	9,28	14,48	10,62	11,46
- Borongan/tebasan	90,72	85,52	89,48	88,57
Harga jual GKP (Rp/kg)	3.841,67	3.800,00	3.864,29	3.835,32
Harga jual borongan (Rp/are)	236.892,23	208.453,95	139.166,67	194.837,62
Nilai jual lahan (Rp 000./are)	679.545,45	122.916,27	130.000,00	310.820,57
Nilai pajak lahan (Rp/are)	26.236,84	8.989,34	13.271,87	16.166,02
Aktivitas penjualan lahan sawah (%)				
- Pernah	41,67	28,00	26,32	32,00
- Belum pernah	58,33	72,00	73,68	68,00

pada hamparan yang sama tetapi ada juga pada hamparan yang berbeda. Sunartomo (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah adalah pemecahan lahan (warisan) sehingga terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Jumlah persil yang digarap rata-rata berkisar 1,76 persil. Dengan semakin terfragmentasinya lahan garapan menjadi beberapa persil tentunya akan memberikan peluang pada ketidakefisienan dalam mengelola usahatannya apabila lahan yang terfragmentasi terletak pada hamparan yang berbeda dan lokasi yang berjauhan.

Kondisi lokasi lahan sawah petani responden juga sangat bervariasi, dimana sebanyak 73,25% berlokasi dekat dengan jalan utama dan sisanya relatif jauh dengan jalan utama. Sedangkan berdasarkan kondisi saluran irigasi yang berkaitan dengan lahan sawah petani responden, sebanyak 69,63% responden menyatakan bahwa kondisi saluran irigasinya relatif dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 30,37% menyatakan kondisi saluran irigasi dalam kondisi tidak baik/rusak. Mansur *et al.*, (2014) dan Artana (2015) menyatakan bahwa faktor pendorong konversi lahan sawah secara fisik dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang

kurang baik khususnya jaringan irigasi. Kondisi lokasi lahan sawah yang dekat dengan jalan utama dan kondisi irigasi yang kurang baik merupakan faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah. Dimana umumnya lahan sawah yang dekat dengan jalan utama memiliki nilai jual yang lebih tinggi, sedangkan kondisi saluran irigasi yang kurang baik/rusak mengakibatkan petani tidak mengusahakan usahatani padi sawah sehingga lahan usahatani tidak produktif lagi untuk padi sawah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terdapat sebanyak 32% petani pernah menjual lahan sawahnya dengan berbagai alasan, dan 68% responden belum pernah menjual lahannya. Dewi dan Sarjana (2015) serta Suharyanto *et al.*, (2016) menyatakan bahwa faktor pendorong petani untuk menjual lahan sawahnya karena pendapatan dari usahatani padi sawah belum mencukupi untuk keperluan hidup rumahtangga atau proporsinya yang semakin kecil, terlebih untuk lokasi sawah yang berada pada daerah perkotaan. Selanjutnya Pramudita *et al.*, (2013) dan Putra (2014) menyatakan dorongan konversi dan atau menjual lahan pertanian dipengaruhi oleh harga jual lahan dan lingkungan sekitar dibandingkan skema insentif pengendalian alih fungsi lahan, ketika lahan sawah di sekitar sudah banyak dialih fungsikan maka lahan sawah yang tersisa akan mendapat tekanan yang sangat besar. Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan yang demikian Iqbal dan Sumaryanto (2007) menyarankan adanya pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam pengendalian alih fungsi lahan.

Secara umum pola tanam yang diusahakan pada lahan sawah di ketiga lokasi penelitian didominasi pola tanam padi-padi-palawija (61,30%), padi-padi-padi (27,52%), padi-padi-bera (3,14%) dan pola tanam lainnya sebesar 8,04%. Pola tanam padi-padi-padi atau padi-padi-palawija umumnya didukung oleh kondisi saluran irigasi yang cukup baik, sedangkan pada pola padi-padi-bera dan pola lainnya dikarenakan kondisi saluran irigasi yang kurang baik.

Produktivitas usahatani padi sawah di ketiga lokasi penelitian sebesar 6,09 t/ha dimana produktivitas tertinggi terdapat di kabupaten Tabanan, yaitu 6,25 t/ha. Hasil tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan produktivitas padi sawah di provinsi Bali yang sebesar 5,88 t/ha. Sistem penjualan yang berlaku di ketiga lokasi penelitian dominan dilakukan secara borongan/tebasan (88,57%) dan dengan sistem bukti melalui penimbangan hanya sebesar 11,46%. Alasan utama petani menjual dengan sistem borongan antara lain, petani umumnya tidak ingin repot lagi dengan adanya aktivitas panen karena akan mengeluarkan biaya panen lagi dan umumnya tenaga kerja panen sangat terbatas, sehingga umur panen biasanya menjadi terlewat. Selain itu petani juga biasanya ingin mendapatkan uang langsung setelah terjadi kesepakatan dengan pembeli, walaupun tidak sedikit juga yang hanya diberikan uang muka terlebih dahulu. Dampak negatif dari sistem borongan ini umumnya petani tidak begitu mengetahui perkembangan informasi harga jual gabah, sehingga tidak sedikit juga biasanya harga akan dipermainkan oleh pembeli/pemborong. Pada saat penelitian berlangsung rata-rata harga jual gabah yang diterima petani sebesar Rp3.855,32/kg sedangkan apabila petani menjual dengan sistem borongan dihargai Rp194.837, 62/are (100m²).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani

Hasil analisis regresi linier terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi respon petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B di Provinsi Bali menunjukkan nilai R² adalah sebesar 0,833 yang berarti variabel yang diduga mampu menjelaskan varians ketepatan respon petani atas karakteristik kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 83,3%, sedangkan sisanya 26,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang belum dimasukkan dalam model ini. Dilihat dari uji F, model yang dibangun adalah layak yang dapat dilihat dari signifikansi uji F nya.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa dari 14 variabel yang dimasukkan dalam model, 8 variabel menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata dan sisanya 6 variabel tidak nyata persepsi petani

di Bali memiliki budaya bertani yang tinggi, karena keterikatannya pada sistem subak yang merupakan organisasi sosio religious. Pasandaran (2006) menyatakan bahwa nilai budaya yang

Tabel 3. Hasil analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap respon petani terhadap implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Provinsi Bali, 2015.

Variabel	Koefisien Regresi	t-Hit	Sig-t
Konstanta	1,001	2,731	0,008
Umur	0,002 ^{ns}	0,049	0,961
Tingkat Pendidikan	-0,005 ^{ns}	-0,378	0,707
Budaya bertani	0,112 ***	3,233	0,002
Sikap terhadap perubahan	0,207 ***	3,611	0,001
Keyakinan kemampuan diri	0,065 **	2,069	0,042
Tingkat Keberanian berisiko	0,130 **	2,180	0,033
Tingkat Intelegensia	0,089 **	2,548	0,013
Tingkat Rasionalitas	0,033 ^{ns}	0,367	0,715
Harapan akan hasil	0,101 ^{ns}	1,617	0,111
Kerjasama	0,086 **	2,270	0,026
Interaksi	0,021 ^{ns}	0,537	0,593
Kekosmopolitan	0,042 ^{ns}	0,908	0,367
Peran dalam Kelompok Tani	0,177 ***	4,255	0,000
Intensitas sosialisasi	0,136 ***	4,180	0,000
R ²	0,833		
F	24,656 ***		
Sig-F	0,000		

Sumber : data primer (diolah), 2015.

Keterangan :

*** : nyata sig.α (p≤0,001)

** : nyata sig.α (p≤0,05)

ns : tidak nyata sig.α (p>0,10)

terhadap implementasi kebijakan PLP2B. Variabel budaya bertani berpengaruh sangat nyata terhadap pembentukan persepsi petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B (sig α ≤ 0,01) dengan arah pengaruhnya positif. Dengan demikian petani yang berbudaya bertani tinggi berpengaruh tinggi terhadap persepsinya atas implementasi kebijakan PLP2B. Petani yang budaya bertani tinggi mempunyai ketaatan aturan, ketaatan cara dalam usahatani, mempunyai kebiasaan yang teratur sehingga dimungkinkan menilai suatu yang baru secara biasa saja (menganggap tidak rumit, mudah dicoba dan mudah diamati). Sebagaimana dinyatakan oleh Pewista dan Harini (2013) persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Semua petani padi sawah

melekat pada lahan sawah tidak saja merupakan perekat sosial dan status sosial tetapi juga sebagai modal sosial. Oleh karena itu menurut Pradnyana *et al.*, (2012) apabila alih fungsi lahan sawah terus berlangsung, maka artefak dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kelembagaan subak juga akan lenyap, seperti halnya upacara, solidaritas/kebersamaan, gotong royong dan berbagai aktivitas budaya lainnya.

Sikap terhadap perubahan menggambarkan bentuk kesiapan dalam merespon terhadap suatu perubahan (dalam hal ini alih fungsi lahan). Menurut Rogers dan Shoemaker *dalam* Indraningsih (2011), individu anggota sistem sosial yang berorientasi pada perubahan akan selalu memperbarui diri, terbuka pada hal-hal

baru, dan giat mencari informasi. Sikap terhadap perubahan berpengaruh sangat nyata terhadap respon petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B, dengan arah pengaruhnya yang positif. Petani yang mempunyai sikap terhadap perubahan yang tinggi maka menempatkan sesuatu yang baru sebagai hal yang penting untuk diperhatikan dalam membantu usahatani yang dilakukan, sehingga program akan dinilai dari segi mudah tidaknya diterapkan, segi untung rugi, aspek rumit tidaknya dan sesuai tidaknya untuk diterapkan. Petani yang mempunyai sikap terhadap perubahan yang tinggi maka selalu memperbaharui gagasan, informasi dan tindakan dalam mempertahankan lahan usahatannya, terbuka pada informasi dan inovasi, merasa senang terhadap kebaharuan gagasan dan merasakan pentingnya informasi timbulnya dorongan untuk memperbaharui tindakan.

Self-efficacy (keyakinan kemampuan diri) merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk mengerjakan beberapa tindakan penguasaan terhadap fungsi dirinya dan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya. *Self-efficacy* mempengaruhi kemampuannya dalam mengeksekusi perilaku tertentu atau kepercayaan untuk berhasil dalam melakukan beberapa perilaku yang saling terkait (Yahya, 2016). *Self efficacy* berpengaruh nyata terhadap pembentukan persepsi petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B dengan arah pengaruh positif. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi keyakinan kemampuan diri petani maka akan semakin tinggi juga responnya terhadap implementasi kebijakan PLP2B. Adanya sesuatu yang baru yang diintroduksikan kepada petani tersebut dinilai sebagai suatu solusi dalam mengendalikannya alih fungsi lahan sawah melalui penerapan kebijakan PLP2B.

Tingkat keberanian petani untuk mengambil risiko merupakan salah satu faktor psikologis petani tersebut dalam menghadapi berbagai kemungkinan atau keputusan yang diambil dalam suatu kegiatan berkaitan dengan usahatannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat keberanian mengambil risiko memiliki pengaruh

yang nyata dengan arah pengaruh positif. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi keberanian untuk mengambil risiko maka semakin tinggi persepsi petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B maka sesuatu program yang diintroduksikan dimaknai sebagai sesuatu yang seharusnya mudah dilakukan dan yakin membantu memudahkan kendala alih fungsi lahan sawahnya, karena merasa telah dijamin oleh regulasi yang kuat disertai adanya insentif dan disinsentif. Hasil penelitian Indraningsih (2011) mengungkapkan bahwa peningkatan persepsi petani terhadap inovasi akan semakin tajam jika pada diri petani terdapat sifat berani mengambil risiko dan lebih berorientasi keluar sistem sosialnya (kosmopolit). Namun tidak semua petani pemilik lahan berani untuk mengambil risiko dikarenakan tingkat pengetahuan mereka yang masih rendah. Wiranoto dan Hardati (2014) menyebutkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan petani terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga memicu petani untuk menjual lahan sawahnya karena desakan faktor ekonomi.

Tingkat intelegensia merupakan kemampuan petani mempertimbangkan pilihan yang ada dalam mengelola usahatani padi sawah terkait dengan aspek alih fungsi lahan. Tingkat intelegensia berpengaruh nyata dengan arah pengaruh positif terhadap kebijakan PLP2B. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat intelegensia yang dimiliki petani maka semakin tinggi respon petani terhadap kebijakan PLP2B. Tingkat intelegensia berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan manfaat dari: aspek produksi, aspek teknik usahatani, kebutuhan pasar, aspek pendapatan bagi masing-masing petani berkaitan dengan keberlanjutan mempertahankan lahan usahatannya. Petani yang mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu dari segala aspek berkaitan dengan keberlanjutan usahatannya maka cenderung menilai sesuatu program yang diintroduksikan pada kategori yang tinggi dan mudah untuk diimplementasikan. Lebih lanjut Rahmanto *et al*, (2006) menyatakan bahwa banyaknya anggota

masyarakat, terutama *stakeholder* pembangunan daerah yang kurang memahami dan menyadari arti penting dari multifungsi lahan sawah secara utuh, maka hal ini dapat berimplikasi pada semakin sulitnya upaya pengendalian konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian

Masyarakat petani padi sawah khususnya yang tergabung dalam kelembagaan subak selalu berhubungan sosial dan keagamaan dengan masyarakat lainnya, salah satunya dalam bentuk kerjasama. Hubungan sosial biasanya diwarnai suatu tipologi khas sesuai dengan karakteristik dan orientasi kelompok masyarakat. Kerjasama berpengaruh terhadap pembentukan persepsi kebijakan PLP2B, dengan arah pengaruh positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kerjasama yang dilakukan maka semakin tinggi respon petani terhadap kebijakan PLP2B dengan kata lain petani yang sering melakukan kerjasama maka cenderung mempunyai persepsi petani terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tinggi. Implementasi kebijakan PLP2B hanya dapat dilakukan dalam suatu kawasan, oleh karena itu mutlak dibutuhkan adanya kerjasama antar sesama anggota subak dalam suatu kawasan tersebut untuk mengimplementasikannya. Petani yang sering melakukan kerjasama cenderung mempunyai informasi yang tinggi dan pertimbangan strategi yang baik dalam berusahatani sehingga dapat mempersepsikan tinggi program baru dengan pertimbangan yang rasional. Kerjasama tersebut dapat berupa penyediaan sarana produksi dalam satu kawasan, pemasaran hasil secara kolektif, kerjasama dengan kelembagaan pendukung lainnya seperti penyedia teknologi, sumber permodalan bahkan dengan kelompok tan lainnya.

Peran dalam kelompok tani adalah penilaian petani terhadap peran anggota maupun pengurus kelompok dalam mempengaruhi aktivitasnya untuk mencapai tujuan dirinya dan kelompok. Umstot (1988) menyatakan ada tiga peran didalam kelompok terkait aktifitas kelompok yakni *task role*, *maintenance role*, dan *blocking role*. Ketiga peran tersebut selalu berinteraksi

dalam berbagai aktivitas pencapaian tujuan kelompok. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran dalam kelompok tani berpengaruh sangat nyata terhadap persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B dengan arah positif. Berarti semakin tinggi peran dalam kelompok tani maka semakin tinggi pula persepsi petani terhadap PLP2B. Pengaruh positif dari peran tersebut sejalan dengan penelitian Franco *et al.* (2011) tentang peran organisasi dan partisipasi masyarakat kaitannya dengan kinerja. Kondisi kelompok yang kondusif memungkinkan para anggota kelompok tani untuk saling belajar, tukar menukar informasi berkaitan dengan adanya sesuatu hal yang mereka anggap baru. Hasil penelitian Suardi *et al.* (2016) menyatakan perlunya peningkatan potensi dan peran kelembagaan pertanian dalam implementasi kebijakan PLP2B.

Hasil analisis intensitas sosialisasi/ penyuluhan berpengaruh nyata terhadap respon petani terhadap kebijakan PLP2B dengan arah positif. Sosialisai atau penyuluhan adalah salah satu faktor penting dalam adopsi suatu inovasi. Penyuluhan ataupun sosialisasi yang konsisten dan berkelanjutan semestinya akan menambah pengetahuan dan membuka wawasan petani untuk menerima hal-hal yang baru. Jadi sasaran penyuluhan adalah pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani. Dalam proses penyuluhan tersebut terjadi transfer pengetahuan secara benar sehingga merubah wawasan, pola berpikir sistematis para petani, informasi yang didapatkan mendorong penilaian terhadap inovasi baru yang diperkenalkan menjadi positif. Hasil penelitian Rantini dan Prabatmodjo (2014) menyatakan bahwa komunikasi dengan PPL sangat mempengaruhi tanggapan petani, karena melalui PPL petani memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani, termasuk mengenai kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan disinsentifnya. Dengan demikian semakin sering penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka semakin tinggi pula respon petani untuk

mengimplementasikannya. Menurut Rachmat dan Muslim (2012), sosialisasi kepada petani dinilai sangat penting sebagai subyek yang lahan miliknya akan terkena peraturan. Sosialisasi yang didalamnya berkaitan dengan kewajiban dan hak yang dimiliki petani diperlukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya mempertahankan lahan pertanian sebagai lahan usahanya secara berkelanjutan. Lebih lanjut Nugraharani dan Wikarta (2014) menekankan bahwa agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan ditingkat petani, selain sosialisasi yang intensif, juga perlunya pemahaman masyarakat tani yang mendalam terhadap kebijakan tersebut, selain komitmen pemerintah baik dari aspek pendanaan, petugas dan koordinasi antar institusi.

KESIMPULAN

Karakteristik usahatani padi sawah di Provinsi Bali yang dicirikan dengan luas lahan yang relatif kecil dan terfragmentasi, dengan aksesibilitas yang baik merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya alih fungsi lahan sawah apabila tidak diikuti penerapan kebijakan PLP2B. Persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B beragam karena dipengaruhi oleh: budaya bertani, sikap terhadap perubahan, keyakinan kemampuan diri, tingkat keberanian berisiko, tingkat intelegensia, rasionalitas, kerjasama, peran dalam kelompok tani serta intensitas penyuluhan ataupun sosialisasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PLP2B maka perlu mempertimbangkan perbedaan tingkat persepsi terhadap kebijakan tersebut dengan mengoptimalkan peran anggota dalam kelompok tani maupun petani inovator disertai dengan sosialisasi intensif dan partisipatif disertai komitmen pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi tingginya disampaikan pada SMARTD Badan Litbang Pertanian yang telah mensupport pendanaan penelitian melalui kegiatan KKP3SL Tahun Anggaran 2015. Ucapan senada juga disampaikan pada Bapak Prof (R) Dr. Ir. I Wayan Rusastra, MS atas bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga dan masukan yang sangat konstruktif selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrozi, A.M dan Saptana. 2013. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten. Prosiding Semir Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. PSEKP Bogor. hal 519-531.
- Artana, I M. 2015. Strategi Penyelamatan Lahan dalam Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Tabanan. Prosiding Seminar Nasional Peran Inovasi Teknologi dan Jasa Lingkungan Budaya Subak dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Kerjasama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dan Universitas Hindu Indonesia. Denpasar. Hal 23- 29.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013. Luas lahan menurut penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Denpasar. 94 hal
- Benu, N.M., Maryunani, Sugiyanto and P Kindangen. 2013. Analysis of land

- conversion and its impacts and strategies in managing them in city of Tomohon, Indonesia. *Asian Transaction on Basic and Applied Sciences*, vol. 3(2): 65-72.
- Dewi, I A L dan I M Sarjana. 2015. Faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian (Kasus Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *Jurnal Manajemen Agribisnis*, vol. 3(2): 163-171.
- Franco, J.S. Manuel, A.F. Villarejo Ramos, and F.A. Martin Velicia. 2011. Social integration and post-adoption usage of social network sites: an analysis of effects on learning performance". *Procedia Social and Behavioral Sciences*, vol. 15:256-262. Available online at <http://www.sciencedirect.com>.
- Indraningsih, K.C. 2011. Pengaruh penyuluhan terhadap keputusan petani dalam adopsi inovasi teknologi usahatani terpadu. *Jurnal gro Ekonomi*, vol. 29(1): 1- 24.
- Iqbal, M dan Sumaryanto. 2007. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada partisipasi masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 5(2): 167-182.
- Irawan, B. 2005. Konversi lahan sawah : potensi dampak, pola pemanfaatannya dan faktor determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 23(1): 1-18
- Janti, G.I., E Martono dan Subejo. 2016. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol. 22(1): 1-21.
- Mansur, Y.H., E Soetarto dan K Gandasasmita. 2014. Pola konversi lahan dan strategi perlindungan lahan sawah di Kota Sukabumi. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, vol. 8(2): 109-123.
- Nugraharani, D dan E.K. Wikarta. 2014. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mengatasi alih fungsi lahan (Studi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat). *Agric. Sci. J. I*, (4): 122-132.
- Pasandaran, E. 2006. Alternatif kebijakan pengendalian konversi lahan sawah beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, vol. 25(4): 123-129.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029.
- Pewista, I dan R Harini. 2013. Faktor dan pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosia ekonomi penduduk di Kabupaten bantul. Kasus daerah perkotaan, pinggiran dan pedesaan Tahun 2001 2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 2(2): 96-103.
- Pradnyana, K.B., W Ginarsa dan W Sudarta. 2012. Persepsi petani terhadap pelestarian pertanian sawah sistem subak di perkotaan. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, vol. 1(1): 45-52.
- Pramudya, D., A.H. Dharmawan dan B Barus. 2015. Kesesuaian sosial ekonomi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan. *Sodality*, vol. 3(2): 125-134.
- Putra, I.W.I.P. 2014. Incentive approach toward retaining cultivated farmland. A case of Badung District, Bali Province. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 10(4): 369-375.
- Rachmat, M dan C Muslim. 2012. Peran dan tantangan implementasi UU 41/2009 dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan *dalam* kemandirian pangan Indonesia dalam perspektif kebijakan MP3EI. IAARD Press. Jakarta. Hal 59-81.
- Rahmanto, B., B Irawan dan N.K. Agustin. 2006. Persepsi mengenai multifungsi lahan sawah dan implikasinya terhadap alih fungsi ke penggunaan non pertanian. *Jurnal SOCA*, vol. 6(2): 1- 31.
- Rantini, R.R dan H Prabatmodjo. 2014. Tanggapan petani terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian

- berkelanjutan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 3(2): 373-380.
- Rokhmah, M. 2012. Potensi dan kendala kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 8(2): 157-166.
- Sayaka, B dan H Tarigan. 2011. Efektivitas peraturan dalam mengendalikan konversi lahan pertanian dalam konversi dan fragmentasi lahan ancaman terhadap kemandirian pangan. Eds : Pasaribu, S.M., H.P. Saliem., H. Soeparno., E. Pasandaran dan F Kasryno. Penerbit IPB Press. Bogor. Hal 279-292.
- Slameto, F. Trisakti Haryadi, dan Subejo. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Beberapa Etnis Petani Terhadap Karakteristik Inovasi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah di Lampung. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, vol. 17(1): 1-13.
- Suardi, I.D.P.O, D.P. Darmawan dan I.D.G.R. Sarjana. Potensi dan peran kelembagaan pertanian dalam perlindungan lahan pertanian pangan di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, vol. 4(1): 1-9.
- Suharyanto, K. Mahaputra, N N Arya dan J Rinaldi. 2016. Faktor penentu alih fungsi lahan sawah ditingkat rumah tangga petani dan wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, vol. 19(1): 9- 22.
- Sumaryanto, Hermanto, dan E Pasandaran. 1996. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Sosial Ekonomi Petani. Dalam *Prosiding Lokakarya "Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air"*: Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 92-112. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dand Ford Foundation. Bogor.
- Sumaryanto. 2010. Faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan petani menjual lahan. *Jurnal Informatika Pertanian*, vol. 19(2): 1-15.
- Sumiyati, L Sutiarmo., I W Windia dan P Sudira. 2011. Aplikasi Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk penentuan Strategi Pengembangan Subak. *Agriotech*, vol. 31(2): 138-145
- Sunartomo, A.F. 2015. Perkembangan konversi lahan pertanian di Kabupaten Jember. *Agriekonomika*, vol. 4(1): 22-36.
- Sutarto. 2008. Hubungan sosial ekonomi petani dengan tingkat adopsi inovasi teknologi komoditas jagung di Sidoharjo Wonogiri. *Agritext*, vol. 24: 1-12.
- Umstot, D. 1988. *Understanding organizational behaviour*. West Publishing Company. New York. 532p.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
- Wiranoto, M.A dan P Hardati. 2014. Respon keluarga pemilik sawah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pematang. *Geo-Image*, vol. 3(2): 1-6.
- Yahya, M. 2016. Faktor faktor yang mempengaruhi terhadap adopsi petani dalam pengelolaan tanaman terpadu padi sawah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. *Agrica Ekstensia*, vol. 10(2): 1-7.
- Zakaria, A.K dan B Rachman. 2013. Implementasi sosialisasi insentif ekonomi dalam pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 31(2): 139-149.